

## PERALIHAN TV ANALOG KE DIGITAL

# 5.914 Rumah Tangga Diusulkan Peroleh 'Set Top Box'

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya telah mengusulkan calon penerima bantuan set top box ke pemerintah pusat. Tercatat ada 5.914 rumah tangga yang diusulkan untuk menerima bantuan peralatan sebagai bagian peralihan TV analog ke TV digital tersebut.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogya Edi Sugiharto, menjelaskan terdapat 341 daerah yang akan menerima bantuan set top box dari pemerintah pusat. "Termasuk Kota Yogya. Usulannya juga su-

dah kami sampaikan yakni rumah tangga dari keluarga miskin," jelasnya, Jumat (5/8).

Data rumah tangga yang diusulkan tersebut merupakan hasil verifikasi dan validasi di wilayah yang sudah dilakukan oleh kelurahan dan kementren. Berda-

sarkan data awal terdapat hampir 20.000 rumah tangga miskin yang berpotensi menjadi penerima bantuan set top box di Kota Yogya. Namun setelah dilakukan verifikasi sesuai syarat sebagai calon penerima, maka hanya tersisa sebanyak 5.952 rumah tangga miskin. "Itu pun kemudian diverifikasi kembali secara faktual di lapangan dan hanya 5.914 yang memenuhi ketentuan," imbuhnya.

Sejumlah ketentuan yang menjadi syarat bagi rumah tangga miskin sebagai calon

penerima bantuan set top box di antaranya adalah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Selain itu memiliki TV analog dan menikmati siaran terestrial serta lokasi rumah tangga berada dalam jangkauan siaran TV digital. "Jika di dalam satu rumah terdapat lebih dari satu keluarga miskin, berbeda kartu keluarga (KK), maka hanya dapat menerima satu unit set top box saja," tandasnya.

Penyampaian usulan itu pun

sudah dilakukan pada awal Agustus 2022. Sesuai informasi, data dari seluruh Indonesia sudah harus masuk paling lambat 30 Agustus. Selanjutnya pada 2 November 2022 sudah harus terpasang di rumah tangga sasaran.

Akan tetapi, Edi menyebut belum memperoleh informasi mengenai mekanisme distribusi dan pemasangan di rumah tangga miskin yang menjadi penerima bantuan. Jika merujuk teknis distribusi bantuan dari pemerintah pusat selama ini, maka

dimungkinkan melalui Kantor Pos. Sedangkan teknis pemasangannya dengan kerja sama pihak ketiga. Sebelumnya, rumah tangga penerima juga akan menandatangani surat perjanjian penerimaan bantuan set top box.

"Kami pun belum diinformasikan kuota yang disiapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai bantuan set top box. Kami sebatas mengumpulkan data sesuai hasil verifikasi di lapangan," terangnya. (Dhi)-f

## JAGA KEABSAHAN DOKUMEN PARPOL

### Masyarakat Diberi Peluang untuk Menanggapi

**YOGYA (KR)** - Proses pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 masih berlangsung. Namun demikian masyarakat diberikan peluang untuk memberikan tanggapan jika menilai ada keraguan terhadap keabsahan dokumen persyaratan parpol.

Peluang tersebut dijelaskan secara rinci dalam pasal 140 PKPU 4/2022. Tanggapan itu dapat disampaikan sampai dengan sebelum penetapan parpol peserta Pemilu 2024. "Dimulainya bisa saja, namun untuk kelengkapan calon peserta pemilu yang menyampaikan pendaftaran kan belum berakhir. Berakhir sampai 14 Agustus pukul 23.59 WIB," ungkap Komisioner KPU Kota Yogya Erizal, Jumat (5/8).

Dikutip dari laman KPU, hingga kemarin terdapat 11 parpol yang telah mengajukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Akan tetapi hanya delapan parpol yang berkasnya dinyatakan lengkap. Kedelapan parpol tersebut ialah PDIP, PKP, PKS, Perindo, Partai NasDem, PBB, PKN dan Partai Garuda. Sedangkan tiga papol lain yakni Partai Reformasi, Prima dan Pandai, berkasnya belum lengkap.

Kendati demikian, jika ada masyarakat yang memberikan tanggapan maka KPU, termasuk KPU Kota Yogya juga siap untuk menindaklanjuti. Tanggapan masyarakat tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan

keterlibatan publik dalam mengawal proses demokrasi sejak masa tahapan Pemilu 2024. "KPU RI sudah mensosialisasikan perihal tanggapan masyarakat ini. Formnya juga dapat diakses secara luas," imbuh Erizal.

Form tanggapan masyarakat tersebut bisa diisi secara langsung melalui laman [helpdesk.kpu.go.id/tanggapan](http://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan). Dalam form terdapat kolom yang harus diisi meliputi identitas pelapor, KPU tujuan hingga jenis masukan atau tanggapan berikut buktinya. Data yang masuk itu pun akan diteruskan ke KPU setempat untuk dilakukan klarifikasi sebagai bahan pertimbangan sebelum dilakukan penetapan.

Setelah dilakukan penetapan, imbuh Erizal, parpol juga dapat melakukan pemutakhiran data berkelanjutan kepengurusan parpol dari tingkat kecamatan hingga pusat, kemampuan pengurus parpol, keanggotaan serta domisili kantor. Hanya, pemutakhiran data oleh parpol harus didahului dengan surat permohonan ke KPU.

Di samping itu, masyarakat juga dapat mengakses secara terbuka terkait tahapan pemilu melalui laman [infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id). Dalam laman itu juga terdapat menu untuk mengakses berbagai aturan atau regulasi menyangkut pemilu, hingga mengecek data anggota parpol menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). (Dhi)-f

## PERMUDAH URAI ANTREAN DI PERSIMPANGAN Dishub Pasang Dua ATCS Baru

**YOGYA (KR)** - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogya memasang dua Area Traffic Control System (ATCS) baru di persimpangan. Kedua fasilitas pendukung rambu lalu lintas tersebut dipasang di simpang Pingit dan simpang Lempuyang Wangi.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Yogya Windarto, mengungkapkan ATCS tersebut ditujukan untuk meningkatkan keselamatan dan kinerja lalu lintas di kawasan itu. "Kami pasang di simpang Pingit dan simpang Lempuyang Wangi. Sedang dalam proses pemasangan," jelasnya, belum lama ini.

Penentuan pemasangan ATCS tersebut mempertimbangkan kondisi lalu lintas di dua lokasi itu. Di samping itu masukan dari pengguna jalan turut menjadi pertimbangan. Simpang Pingit dikenal masyarakat memiliki durasi lampu lalu lintas terlama di antara simpang jalan lain di Kota Yogya. Hal itu pun kerap dikeluhkan pengguna jalan karena harus berhenti cukup lama saat lampu merah.

Sementara itu di simpang Lempuyang Wangi kerap terjadi kepadatan lalu lintas saat jam sibuk pada pagi dan sore hari. "Setelah ada fasilitas ATCS nanti bisa kita atur durasi lampu traffic light sesuai dengan kebutuhan," imbuh Windarto.

Menurutnya, fasilitas ATCS yang ter-

pasang di dua simpang tersebut juga akan dilengkapi dengan fasilitas tambahan seperti speaker atau pengeras suara. Sarana itu bisa dimanfaatkan petugas untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan. Sedangkan alokasi anggaran yang disiapkan untuk pemasangan rambu bersuara dan ATCS pada tahun ini sekitar Rp 600 juta.

Windarto memaparkan, saat ini sejumlah lampu lalu lintas yang terhubung dengan ATCS juga sudah didukung fasilitas pengeras suara. Di antaranya di simpang empat SGM, simpang Sentul, simpang Jalan Cendana, simpang Permata, dan simpang Gondomanan. "Harapan kami seluruh simpang di Kota Yogya yang mencapai 52 simpang, akan terhubung dalam ATCS yang juga dilengkapi pengeras suara. Tetapi tidak bisa sekaligus, pengadaan bertahap karena kebutuhan anggarannya juga besar," paparnya.

Melalui ATCS, dimungkinkan pengaturan durasi lampu lalu lintas bisa dilakukan lebih mudah. Hal ini karena bisa langsung dikontrol secara terpusat disesuaikan kondisi lalu lintas di lapangan. Dengan begitu antrean kendaraan di salah satu simpang yang dinilai cukup panjang akibat tingginya volume kendaraan, dapat diurai secara optimal. (Dhi)-f

## Agustus, DIY Memasuki Puncak Musim Kemarau

**YOGYA (KR)** - Hampir semua wilayah DIY pada awal Agustus secara umum sudah memasuki musim kemarau. Bahkan awal musim kemarau di DIY umumnya terjadi pada dasarian 3 Juni atau akhir Juni. Hal itu ditandai dengan adanya pergerakan monsoon Australia (angin timuran) di wilayah DIY.

"Kalau dilihat dari data-data yang ada di BMKG, diprediksikan puncak musim kemarau 2022 di DIY umumnya terjadi pada Agustus awannya relatif sedikit

2022. Diperkirakan pada bulan Agustus intensitas hujan berkisar 0 sampai 20 mm," kata Kepala kelompok data dan informasi BMKG Stasiun klimatologi Sleman, Etik Setyaningrum MSi di Yogyakarta, Jumat (5/8).

Menurut Etik, pada puncak musim kemarau yang dominannya angin timuran atau monsoon Australia yang karakteristiknya membawa masa udara dingin dan kering. Kondisi itu ditambah dengan adanya tutupan awannya relatif sedikit

dan kelembaban udara juga rendah. Sehingga menyebabkan suhu menjadi rendah dampaknya dalam beberapa waktu terakhir suhu udara menjadi terasa dingin.

"Kami minta masyarakat selalu menjaga imunitas tubuh dengan cara mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu untuk memantau kondisi terkini tentang cuaca alangkah baiknya apabila masyarakat mengupdate informasi dari BMKG," terangnya. (Ria)-f

## KERJA SAMA 22 OBH, BANTU WARGA MISKIN

### Layanan Bantuan Hukum Mulai Dimanfaatkan

**YOGYA (KR)** - Sejak digulirkan pada Februari lalu, layanan bantuan hukum kini mulai dimanfaatkan. Khususnya bagi penduduk miskin yang tengah mengalami perkara hukum. Subkoordinator Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Kota Yogya Saverius Vanny Noviantri, mengungkapkan pihaknya telah bekerja sama dengan 22 organisasi bantuan hukum (OBH). "Sebenarnya, kami tidak hanya menangani bantuan untuk litigasi saja tetapi ada juga bantuan nonlitigasi yang sudah dimanfaatkan masyarakat miskin," jelasnya, Jumat (5/8).

Layanan bantuan hukum untuk warga miskin tersebut hanya bisa diakses oleh penduduk Kota Yogya yang dibuktikan dengan kepemilikan identitas kependudukan. Kendati lokasi perkara bukan di Kota Yogya, bantuan hukum tetap bisa diberikan asalkan organisasi bantuan hukum memberikan persetujuan.

Vanny menambahkan, sejauh ini sudah ada empat organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan kepada masyarakat miskin Kota Yogya yang sedang menghadapi beberapa perkara. Perkara tersebut antara lain pencurian dan perceraian.

Oleh karena itu, penduduk miskin Kota Yogya yang sedang berhadapan dengan hukum atau membutuhkan sosialisasi dan penyuluhan hukum, bisa memanfaatkan layanan tersebut dengan datang langsung ke Kantor Bagian Hukum Pemkot Yogya. "Nanti kami akan mengarahkan mereka untuk bisa berkomunikasi dengan OBH yang sudah masuk dalam daftar sehingga perkaranya bisa ditangani," imbuhnya. Akan tetapi, imbuhnya, terdapat sejumlah perkara hukum yang tidak dapat mengakses layanan tersebut, yaitu perkara terkait makar, terorisme, korupsi, dan narkoba.

Layanan bantuan hukum digulirkan setelah munculnya Perda

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Kemudian dijabarkan melalui Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 sebagai petunjuk pelaksanaannya. "Seharusnya, lanjut dia, layanan bantuan hukum untuk warga miskin tersebut direncanakan diluncurkan pada 2021, tetapi ada regulasi baru terkait alokasi anggaran dalam bentuk bantuan sosial sehingga peluncuran layanan baru bisa dilakukan pada awal 2022," paparnya.

Setiap OBH akan memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp 12 juta yang terbagi untuk kebutuhan litigasi hingga perkara inkraht Rp 8 juta, dan sisanya untuk nonlitigasi. Total alokasi anggaran pada tahun ini untuk 22 OBH sebanyak Rp 264 juta dengan sistem reimburse atau diberikan setelah selesai menangani perkara. "Ada aturan mengenai standar biaya di setiap perkara dan tahapan penanganan kasus. Setiap OBH yang bekerja sama sudah memahami hal tersebut," katanya. (Dhi)-f

**Kedaulatan Rakyat**  
**EPAPER**  
[www.kr.co.id](http://www.kr.co.id)

Berlangganan Scan Barcode

Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggam tangan Anda. Sekarang.